



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJ. SITI BADRIYAH
2. Jabatan : KETUA/KOORDINATOR PROGRAM STUDI DESAIN INTERIOR
3. NHK : 900141

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.502.250.000

1. Tanah Seluas 125 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 281.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1392 m²/800 m² di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 3.480.000.000
3. Tanah Seluas 234 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 468.000.000
4. Tanah Seluas 334 m² di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 668.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m²/95 m² di KAB / KOTA KOTA
SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA
SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.375.000.000
7. Tanah Seluas 140 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 280.000.000
8. Tanah Seluas 70 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 541.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000
3. MOTOR, YAMAHA - Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA NF11BIDM Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.



5.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA BT2 WAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.		
6.000.000		
6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.		
300.000.000		
7. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.		
180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	39.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	8.111.250.000
III. HUTANG	Rp.	510.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.601.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.